



Berawan
32°C
25°C



Hujan
32°C
25°C



PERMAINAN TRADISIONAL

Komunitas komunitas anak muda melakukan *happening art* dengan memainkan permainan tradisional di Perempatan Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta Minggu (27/10) sore.

Bocah Yogya Kritik Minimnya Ruang Publik

Tribun Jogja/Hendra Krisdianto

JOGJA, TRIBUN - Festival Seni Mencari Haryadi melanjutkan panggungnya. Setelah menggelar paduan suara warga kota, di depan rumah dinas Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, 13 Oktober lalu, kali ini, Minggu (27/10) sore, gabungan bocah kampung se-Kota Yogyakarta menyukseskan *happening art* aksi dolanan anak di Titik Nol Kilometer.

Aksi ini ditujukan sebagai bentuk kritik terhadap minimnya ruang publik di kota. Imbasnya, warga tak lagi punya wadah untuk berinteraksi sosial bersama tetangga terdekat. Bahkan bocah-bocah dipaksa ber-

main di dalam rumah lantaran lapangan yang ada berganti dengan tembok permukiman.

"Tempat bermain di kampung sudah hilang. Makanya kami sampaikan apa yang dirasakan dengan cara seperti ini. Harapannya Pemkot mendengarkan," terang penggagas aksi, Nopel Rachmad, di sela aksi, Minggu sore.

Puluhan anak muda beraksi menggunakan berbagai dolanan anak tradisional. Seperti egrang, kitiran, otokotok, karetan, dan mobil-mobilan dari kaleng. Mereka menggunakan ruang di sisi pedestrian barat Titik Nol Kilometer sebagai area ber-

main. Kemudian melebar sampai ke simpang utara dan barat Kantor Pos Besar ketika APILL menyala merah.

Di tengah aksi, puluhan pemuda yang mengenakan pakaian tradisional, yang sebagian mengecat wajahnya, mengikrarkan 'Janji Bocah Jogja'. Empat poin pada janji itu adalah berjanji terus bermain meski tak ada ruang, berjanji terus ingin tahu kemajuan kota, berjanji menjadikan kota kami seru dan asyik, berjanji menjaga kota kami tetap sehat dan nyaman.

Nopel menyampaikan

H S

YOG
Men
tam
dar
didika
vard Kem
rika Serika
Yogyakarta
(HS), blusu
tempat. Mi
mengawa
menghadi
Masjid Jog
Kemud
pukul 06.
dampingi
nya mele
Alun Alun
kan denga
jalan sehat
acara berse
re, sekitar
Menjela

Ha

MENANGGA
tanpa sekat
Koencoroye
si. Namun, i
dilakukan s
memberikan
yang dihada
"Hasiln
masyarakat

Ters

Kirin
YOGYA, T
Dirut PT
(JTT) atau
wanto Joh
rimkan so
dan Peme
(BPK) RI t
berupa La
hitungan
Daerah at
korupsi b
kendaraan
nyataan s
paikanny
hukumnya
SH.
Dalam

YOGYA
200 ang
2 Singar
karta,
(26/10)
saat ber
di kaw
Yogyak
Men
Hotel I
tersebu
"Saat

bahwa Kampun Juminahan, tempat ia tinggal sedari kecil, sudah tidak memiliki ruang publik (lapangan). Berganti dengan bangunan rumah susun yang berdiri lebih dari lima tahun silam. Akibatnya, anak kecil harus bermain di sudut-sudut gang sempit berbagi ruang dengan kendaraan yang melintas.

Diwawancara secara terpisah, Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) menyatakan Pemkot telah berupaya menyediakan area publik di tiap kelurahan, dengan cara membeli tanah milik warga untuk dijadikan ruang terbuka sebagai tempat berinteraksi. Terhitung sejak 2006 sampai sekarang Pemkot memiliki 30 lahan yang dijadikan ruang terbuka hijau.

Bahkan Perwal 64/2013 tentang Permohonan Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau mengatur bahwa

ruang yang disediakan Pemkot minimal seluas 200 meter persegi. Sedangkan presentase pemanfaatannya diatur, 40 persen boleh untuk bangunan publik sedangkan 60 persen wajib berbentuk ruang terbuka.

Dengan demikian, upaya Pemkot menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat sudah dilakukan sejak lama. Menurut HS, memang belum berarti sudah optimal tapi Pemkot tidak terus menutup mata dengan fenomena minimnya area publik bagi masyarakat. Bahkan, katanya, Pemkot adalah satu-satunya di DIY yang mengalokasikan dana dari APBD untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Tahun 2013 ini disediakan anggaran pengoptimalan 14 titik ruang terbuka dengan melengkapi sarana prasarana yang ada.

Adapun *Art Director* Fes-

tival Seni Mencari Haryadi Agung Kurniawan mendukung upaya tersebut. Hanya, menurutnya, tidak ada komunikasi dari Pemkot untuk memberitahukan keberadaan ruang terbuka tersebut kepada masyarakat. Selama ini yang jelas tersampaikan hanyalah pembangunan yang dinilai tidak berpihak kepada warga.

"Beritahukan kepada warga di mana ruang itu. Terus bersama-sama kita cek, apakah sudah sesuai seperti yang diutarakan," tegas Agung.

Ia menjelaskan, festival ini adalah bentuk kritik semata. Tidak ada maksud kecaman, apalagi berten-densi politis. Sebab itu, seharusnya wali kota atau jajaran Pemkot bisa merespons aksi dengan hadir kemudian melakukan komunikasi tanpa sekat seperti yang dijanjikan. (hdy)